

Cakupan Implementasi Pengendalian Perizinan Pendidikan

Keterangan: Cakupan Implementasi Pengendalian Perizinan Pendidikan SMK adalah tingkat pelaksanaan pengendalian dan penataan perizinan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diukur berdasarkan jumlah SMK yang telah memiliki izin operasional aktif atau surat rekomendasi resmi dibandingkan dengan seluruh SMK yang beroperasi di wilayah tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kepatuhan penyelenggaraan pendidikan SMK terhadap ketentuan perizinan yang berlaku

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah SMK	SMK yang memiliki Izin Aktif	Presentase	Satuan
1	82	Maluku Utara	8201	Halmahera Barat	16	15	93.75	Persen
2	82	Maluku Utara	8202	Halmahera Tengah	11	10	90.91	Persen
3	82	Maluku Utara	8203	Kepulauan Sula	16	15	93.75	Persen
4	82	Maluku Utara	8204	Halmahera Selatan	25	25	100	Persen
5	82	Maluku Utara	8205	Halmahera Utara	39	39	100	Persen
6	82	Maluku Utara	8206	Halmahera Timur	9	9	100	Persen

No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah SMK	SMK yang memiliki Izin Aktif	Presentase	Satuan
7	82	Maluku Utara	8207	Pulau Morotai	12	12	100	Persen
8	82	Maluku Utara	8208	Pulau Taliabu	7	7	100	Persen
9	82	Maluku Utara	8271	Kota Ternate	9	9	100	Persen
10	82	Maluku Utara	8272	Kota Tidore Kepulauan	7	7	100	Persen
	Total				151	148	98.01	Persen